BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Sejarah Bursa Efek Indonesia

Secara historis, bursa efek telah hadir jauh sebelum Indonesia merdeka. Pasar modal atau bursa efek telah hadir sejak jaman kolonial Belanda dan tepatnya pada tahun 1912 di Batavia. bursa efek ketika itu didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk kepentingan pemerintah kolonial atau VOC. Meskipun bursa efek telah ada sejak tahun 1912, perkembangan dan pertumbuhan bursa efek tidak berjalan seperti yang diharapkan, bahkan pada beberapa periode kegiatan bursa efek mengalami kevakuman. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti perang dunia ke I dan II, perpindahan kekuasaan dari pemerintah kolonial kepada pemerintah Republik Indonesia, dan berbagai kondisi yang menyebabkan operasi bursa efek tidak dapat berjalan normal.

Pemerintah Republik Indonesia mengaktifkan kembali bursa efek pada tahun 1977, dan beberapa tahun kemudian bursa efek mengalami pertumbuhan seiring dengan berbagai insentif dan regulasi yang dikeluarkan pemerintah.

Secara singkat, tonggak perkembangan bursa efek di Indonesia dapat dilihat sebagai berikut:

a. 14 Desember 1912 : Bursa Efek pertama di Indonesia dibentuk di Batavia oleh Pemerintah Hindia Belanda.
b. 1914 – 1918 : Bursa Efek di Batavia ditutup selama Perang Dunia I

c. 1925 – 1942 : Bursa Efek di Jakarta dibuka kembali bersama dengan Bursa Efek di Semarang dan Surabaya

d. Awal tahun 1939 : Karena isu politik (Perang Dunia II) Bursa Efek di Semarang dan Surabaya ditutup.

e. 1942 – 1952 : Bursa Efek di Jakarta ditutup kembali selama Perang Dunia II

f. 1952 : Bursa Efek di Jakarta diaktifkan kembali dengan UU Darurat Pasar Modal 1952, yang dikeluarkan oleh Menteri kehakiman (Lukman Wiradinata) dan Menteri keuangan (Prof.DR. Sumitro Djojohadikusumo). Instrumen yang diperdagangkan: Obligasi Pemerintah RI (1950)

g. 1956 : Program nasionalisasi perusahaan Belanda. Bursa Efek semakin tidak aktif.

h. 1956 – 1977 : Perdagangan di Bursa Efek vakum.

i. 10 Agustus 1977 : Bursa Efek diresmikan kembali oleh Presiden Soeharto. BEJ dijalankan dibawah BAPEPAM (Badan Pelaksana Pasar Modal). Tanggal 10 Agustus diperingati sebagai HUT Pasar Modal. Pengaktifan kembali pasar modal ini juga ditandai dengan go public PT Semen Cibinong sebagai emiten pertama.

j. 1977 – 1987 : Perdagangan di Bursa Efek sangat lesu. Jumlah emiten hingga 1987 baru mencapai 24. Masyarakat lebih memilih instrumen perbankan dibandingkan instrumen Pasar Modal.

k. 1987 : Ditandai dengan hadirnya Paket Desember 1987 (PAKDES 87) yang memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum dan investor asing menanamkan modal di Indonesia.

l. 1988 – 1990 : Paket deregulasi dibidang Perbankan dan Pasar Modal diluncurkan. Pintu BEJ terbuka untuk asing. Aktivitas bursa terlihat meningkat.

m. 2 Juni 1988 : Bursa Paralel Indonesia (BPI) mulai beroperasi dan dikelola oleh Persatuan Perdagangan Uang dan Efek (PPUE), sedangkan organisasinya terdiri dari broker dan dealer.

n. Desember 1988 : Pemerintah mengeluarkan Paket Desember 88 (PAKDES 88) yang memberikan kemudahan perusahaan untuk go public dan beberapa kebijakan lain yang positif bagi pertumbuhan pasar modal.

o. 16 Juni 1989 : Bursa Efek Surabaya (BES) mulai beroperasi dan dikelola oleh Perseroan Terbatas milik swasta yaitu PT Bursa Efek Surabaya.

p. 13 Juli 1992 : Swastanisasi BEJ. BAPEPAM berubah menjadi Badan Pengawas Pasar Modal. Tanggal ini diperingati sebagai HUT BEJ.

q. 22 Mei 1995 : Sistem Otomasi perdagangan di BEJ dilaksanakan dengan sistem computer JATS (Jakarta Automated Trading Systems).

r. 10 November 1995 : Pemerintah mengeluarkan Undang –Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Undang-Undang ini mulai diberlakukan mulai Januari 1996.

s. 1995 : Bursa Paralel Indonesia merger dengan Bursa Efek Surabaya.

t. 2000 : Sistem Perdagangan Tanpa Warkat (scripless trading) mulai diaplikasikan di pasar modal Indonesia.

u. 2002 : BEJ mulai mengaplikasikan sistem perdagangan jarak jauh (remote trading).

2007 : Penggabungan Bursa Efek Surabaya (BES) ke Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan berubah nama menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI).

4.1.2 Struktur Organisasi Bursa Efek Indonesia

A. DEWAN KOMISARIS

1) Komisaris Utama : I Nyoman Tjager
2) Komisaris : Mustofa
3) Komisaris : Chaerudding Berlian
4) Komisaris : Johnny Darmawan
5) Komisaris : Felix Oentoeng Soebagjo

B. DEWAN DIREKSI

1) Direktur Utama : Ito Warsito
2) Direktur Penilaian Perusahaan : Eddy Sugito
3) Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa : Wan Wei Yiong
4) Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan : Uriep Budhi Prasetyo
5) Direktur Pengembangan : Friderica Widyasari Dewi
6) Direktur Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko : Adikin Basirun
7) Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia : Supandi

C. DAFTAR NAMA PEJABAT KEPALA DIVISI / KEPALA SATUAN

No	Jabatan	Nama
Direktorat Utama		
1.	Sekretaris Perusahaan	Irmawati Amran
2.	Divisi Hukum	Dewi Arum Prasetyaningtyas
3.	Satuan Pemeriksa Internal	Widodo
Direktorat Penilaian Perusahaan		
4.	Divisi Penilaian Perusahaan Sektor Riil	I Gede Nyoman B.Y.
5.	Divisi Penilaian Perusahaan Sektor Jasa	Umi Kulsum
6.	Divisi Penilaian Perusahaan Surat Utang	Saptono Adi Junarso
Direktorat Perdagangan & Pengaturan Anggota Bursa		
7.	Divisi Perdagangan Saham	Andre PJ Tolle
8.	Divisi Perdagangan Surat Utang & Derivatif	Erna Dewayani
9.	Divisi Keanggotaan	Andi Sudhana
Direktorat Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan		
10.	Divisi Pengawasan Transaksi	Hamdi Hassyarbaini
11.	Divisi Kepatuhan Anggota Bursa	Kristian S. Manullang
Direktorat Pengembangan		
12.	Divisi Riset	Edison Hulu
13.	Divisi Pengembangan Usaha	Hari Purnomo
14.	Divisi Pemasaran	Isharsaya
15.	*Chief Economist*	Edison Hulu
Direktorat Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko		
16.	Divisi Operasional Teknologi Informasi	Yohanes Liauw
17.	Divisi Pengembangan Solusi Bisnis Teknologi Informasi	Didit Agung Laksono
18.	Divisi Manajemen Risiko	Mohammad Mukhlis
Direktorat Keuangan dan Sumber Daya Manusia		
19.	Divisi Keuangan	Yohanes A. Abimanyu
20.	Divisi Sumber Daya Manusia	Mirna Kurniawati

21. Divisi Umum -

4.1.3 Uraian Jabatan Bursa Efek Indonesia

1. Direktur Utama

   Bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan para Direktur serta kegiatan-kegiatan Satuan Pemeriksa Internal, Sekretaris Perusahaan (termasuk hubungan masyarakat), dan Divisi Hukum.

2. Direktur Penilaian Perusahaan

   Bertanggung jawab atas kegiatan operasional yang terkait dengan: (1) penilaian pendahuluan perusahaan, (2) pencatatan perusahaan, (3) penilaian keterbukaan perusahaan, (4) penelaahan aksi korporasi perusahaan, dan (5) pembinaan emiten (termasuk edukasi peraturan).

3. Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa
   a) Bertanggung jawab atas kegiatan operasional perdagangan saham, perdagangan informasi pasar (*data feed*), perdagangan surat utang dan derivative serta pelaporan transaksi surat utang.
   b) Bertanggung jawab atas pengelolaan aktivitas-aktivitas yang terkait dengan anggota bursa dan partisipan sebagai berikut: (1) pengkajian terhadap persyaratan keanggotaan, (2) kewajiban pelaporan, (3) pelatihan dan pendidikan serta (4) pengawasan (khusus terhadap anggota bursa).

4. Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan

   Bertanggung jawab untuk memastikan dan mengkoordinasikan kegiatan pengawasan dan analisis terhadap aktivitas perdagangan efek di bursa untuk mewujudkan perdagangan efek yang teratur dan wajar, sehingga dapat menjaga integritas dan kredibilitas bursa efek dan pasar modal.

5. Direktur Pengembangan

   Bertanggung jawab atas kegiatan operasional yang terkait dengan: (1) pengelolaan riset pasar modal dan ekonomi, (2) pengembangan produk dan usaha, (3) kegiatan pemasaran, dan (4) kegiatan edukasi dan sosialisasi.

6. Direktur Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko

   Bertanggung jawab atas kegiatan operasional yang terkait dengan: (1) pengembangan solusi bisnis TI, (2) operasional TI, (3) manajemen risiko, dan (4) pengelolaan data (*database management*).

7. Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia

   Bertanggung jawab atas kegiatan operasional yang terkait dengan: (1) pengelolaan keuangan perusahaan, (2) pengelolaan dan pengembangan SDM, (3) pengelolaan administrasi dan kegiatan umum lainnya.

A. Direktorat Utama

1. Satuan Pemeriksa Internal

   a) Bertanggung jawab sebagai *quality assurance* terhadap pelaksanaan pencapaian sasaran perusahaan dengan mempertimbangkan aspek efektivitas dan efisiensi melalui pemeriksaan berkala maupun insidentil

terhadap kegiatan internal organisasi, serta melakukan pelaporan dan pemberian rekomendasi perbaikan yang diperlukan atas hasil pemeriksaan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan Ketua Bapepam dan LK.

b) Bertanggung jawab atas pemantauan kegiatan tindak lanjut dari rekomendasi yang dibangun berdasarkan hasil pemeriksaan internal yang dilakukan.

2. Sekretaris Perusahaan

Bertanggung jawab atas tersedianya rencana kerja perusahaan dan terciptanya kerjasama serta komunikasi yang harmonis dan efektif antar Direksi dan antara Direksi dengan *Stakeholder* lainnya dalam rangka mencapai tujuan serta meningkatkan citra perusahaan.

3. Divisi Hukum

a) Bertanggung jawab untuk memastikan produk hukum yang akan dikeluarkan oleh perseroan sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku dan kepentingan perseroan terlindungi dalam hubungan kerjasama atau kontraktual antara perseroan dengan pihak lain dan telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

b) Memastikan pemberian pendapat hukum sebagai *legal advisor* atas permasalahan hukum berkenaan dengan produk hukum yang telah diberlakukan oleh perseroan, kajian hukum, dan penyelesaian dalam sengketa hukum sesuai dengan peraturan perundang-ungdangan yang berlaku.

B. Direktorat Penilaian Perusahaan

1. Divisi Penilaian Perusahaan – Sektor Rill

   Bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan melaksanakan:

   a) Evaluasi pendahuluan calon emiten sampai dengan pencatatan saham di Bursa.
   b) Evaluasi atas rencana pencatatan saham tambahan sampai dengan pencatatan saham di Bursa.
   c) Pemantauan kepatuhan perusahaan tercatat terhadap peraturan yang berlaku.
   d) Penyebaran informasi perusahaan tercatat kepada publik.
   e) Pembinaan perusahaan tercatat (termasuk pemberian sanksi).
   f) Proses *delisting* (baik yang bersifat *voluntary* maupun *force delisting*).
   g) Pelaksanaan suspense dan unsuspensi.
   h) Pengelolaan dan pemutakhiran *database* emiten termasuk *corporate action.*
   i) Pembuatan dan penyempurnaan prosedur dan peraturan pencatatan sesuai dengan perkembangan pasar modal untuk meningkatkan kualitas dan integritas perusahaan sektor riil yang mencatatkan saham.

2. Divisi Penilaian Perusahaan – Sektor Jasa

   Bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan melaksanakan:

   a) Evaluasi pendahuluan calon emiten sampai dengan pencatatan saham di Bursa.

b) Evaluasi atas rencana pencatatan saham tambahan sampai dengan pencatatan saham di Bursa.
c) Pemantauan kepatuhan perusahaan tercatat terhadap peraturan yang berlaku.
d) Penyebaran informasi perusahaan tercatat kepada publik.
e) Pembinaan perusahaan tercatat (termasuk pemberian sanksi).
f) Proses *delisting* (baik yang bersifat *voluntary* maupun *force delisting*).
g) Pelaksanaan suspense dan unsuspensi.
h) Pengelolaan dan pemutakhiran *database* emiten termasuk *corporate action.*
i) Pembuatan dan penyempurnaan prosedur dan peraturan pencatatan sesuai dengan perkembangan pasar modal untuk meningkatkan kualitas dan integritas perusahaan sektor riil yang mencatatkan saham.

3. Divisi Penilaian Perusahaan – Surat Utang

Bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan melaksanakan:

a) Evaluasi pendahuluan calon emiten sampai dengan pencatatan saham di Bursa.
b) Evaluasi atas rencana pencatatan saham tambahan sampai dengan pencatatan saham di Bursa.
c) Pemantauan kepatuhan perusahaan tercatat terhadap peraturan yang berlaku.
d) Penyebaran informasi perusahaan tercatat kepada publik.
e) Pembinaan perusahaan tercatat (termasuk pemberian sanksi).

f) Proses *delisting* (baik yang bersifat *voluntary* maupun *force delisting*).

g) Pelaksanaan suspense dan unsuspensi.

h) Pengelolaan dan pemutakhiran *database* emiten termasuk *corporate action.*

i) Pembuatan dan penyempurnaan prosedur dan peraturan pencatatan sesuai dengan perkembangan pasar modal untuk meningkatkan kualitas dan integritas perusahaan sektor riil yang mencatatkan saham.

C. Direktorat Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa

1. Divisi Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa

   a) Bertanggung jawab untuk menyelenggarakan perdagangan setiap hari bursa dengan melakukan koordinasi kegiatan pengembangan dan operasional perdagangan saham sehingga terlaksana perdagangan saham yang wajar, teratur dan efisien.

   b) Bertanggung jawab atas kegiatan pengembangan dan operasional penyebaran data dan informasi, sehingga penyebaran data perdagangan dapat mendukung informasi yang dibutuhkan oleh investor untuk pengambilan keputusan investasi dan meningkatkan pendapatan penjualan perdagangan informasi pasar.

2. Divisi Perdagangan Surat Utang dan Derivatif

   Bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan operasional perdagangan surat utang dan derivative, penyempurnaan, pengembangan system dan sarana pasar perdagangan surat utang dan derivative.

3. Divisi Keanggotaan dan Partisipan

   Bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi calon Anggota Bursa dan partisipan, pemantauan, pembinaan, pengembangan, penegakan disiplin anggota bursa serta membantu anggota bursa dan partisipan untuk membentuk, memiliki dan menjaga kredibilitas serta integritas di pasar modal.

D. Direktorat Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan

1. Divisi Pengawasan Transaksi

   Bertanggung jawab untuk memastikan dan mengkoordinasikan kegiatan pengawasan dan analisis terhadap aktivitas perdagangan efek di bursa untuk mewujudkan perdagangan efek yang teratur dan wajar, sehingga dapat menjaga integritas dan kredibilitas bursa efek dan pasar modal.

2. Divisi Kepatuhan Anggota Bursa

   Bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan anggota bursa terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pasar modal termasuk pengendalian internal melalui kegiatan pemeriksaan berkala dan pemeriksaan sewaktu-waktu guna meminimalisasi risiko yang mungkin timbul terhadap nasabah, anggota bursa, dan industri pasar modal.

E. Direktorat Pengembangan

1. Divisi Riset

   a) Bertanggung jawab untuk mengolah dan menyajikan data statistic perdagangan, emiten, dan anggota bursa, melakukan analisis pasar untuk

mencapai efisiensi dan pengembangan bursa, serta mengelola data historis perdagangan dan publikasi rutin lainnya sebagai bahan referensi dan dasar untuk membuat keputusan yang dapat diandalkan.

b) Bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan pengelolaan Pusar Referensi Pasar Modal.

2. Divisi Pengembangan Usaha

   Bertanggung jawab atas kegiatan pengembangan produk-produk bursa dan kegiatan pengembangan pasar untuk meningkatkan likuiditas pasar dan daya saing.

3. Divisi Pemasaran

   Bertanggung jawab dalam merencanakan, mengembangkan, dan mengimplementasikan strategi pemasaran, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat luas dalam rangka mencari dan menambah investor dan calon emiten.

4. *Chief Economist*

   Bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh peristiwa ekonomi nasional dan internasional dapat dijelaskan secara tepat dan akurat, serta dapat memberikan prediksi terhadap peristiwa ekonomi yang akan terjadi secara rasional dengan menggunakan berbagai alat analisa ekonomi untuk kepentingan pengambilan keputusan di BEI demi kepentingan bursa dan pasar modal.

F. Direktorat Teknologi Informasi dan Manajemen Resiko

1. Divisi Operasional Teknologi Informasi (TI)

   Bertanggung jawab atas perencanaan, implementasi, operasi, kepatuhan kebijakan, pengawasan/pemantauan, evaluasi, dan pemeliharaan kinerja infrastruktur berbasis teknologi secara efektif dan efisien sesuai dengan visi, misi, dan strategi BEI.

2. Divisi Pengembangan Solusi Bisnis Teknologi Informasi (TI)

   Bertanggung jawab untuk memastikan berjalannya kegiatan perencanaan, evaluasi, pengembangan dan pemutakhiran system aplikasi dan infrastruktur teknologi informasi sesuai dengan kebutuhan bisnis perusahaan dan selaras dengan perkembangan teknologi terkini, serta memastikan adanya peningkatan kualitas yang berkelanjutan terhadap aplikasi dan infrastruktur teknologi informasi.

3. Divisi Manajemen Risiko

   a) Memastikan perencanaan, pengukuran, monitoring, pengelolaan dan pengendalian risiko di dalam organisasi secara sistematis dan terintegritas. Melakukan monitoring risiko operasional pasar modal, memberikan rekomendasi dan implementasi untuk memperbaiki proses, *reporting*, dan pengendalian untuk menentukan tingkat risiko yang masih dapat diterima dalam pengelolaan perusahaan dan pelaksanaan kegiatan utama pasar modal.

b) Bertanggung jawab dalam membangun strategi dan implementasi penerapan GCG di dalam organisasi.

G. Direktorat Keuangan dan Sumber Daya Manusia

1. Divisi Keuangan

   Bertanggung jawab atas keseluruhan fungsi akuntansi dan perpajakan, dan anggaran serta pengelolaan keuangan untuk memperoleh hasil yang optimal sehingga dapat menghasilkan informasi keuangan yang dapat digunakan untuk mendukung aktifitas operasional perusahaan.

2. Divisi Sumber Daya Manusia

   Memastikan terpenuhinya pengadaan, penempatan, pendidikan, dan pengembangan karyawan secara terencana, efektif, dan efisien di setiap unit kerja, serta mengadministrasikan strategi yang berkaitan dengan kompensasi dan jasa, dan hubungan industrial sehingga karyawan BEI berkualitas dan mampu memberikan kontribusi yang signifikan untuk mendukung rencana strategi perusahaan.

3. Divisi Umum

   Bertanggung jawab untuk memastikan ketersediaan dan kelancaran pemenuhan kebutuhan atas fasilitas.

4.1.4 Gambaran Umum Subyek Penelitian

1. PT. Bank Niaga Tbk. (BNGA)

Bank Niaga didirikan menurut hukum yang berlaku di Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan No. 90 yang dibuat dihadapan Raden Meester Soewandi, Notaris di Jakarta tanggal 26 September 1955 dan diubah dengan akta dari notaris yang sama No. 9 tanggal 4 Nopember 1955. Bank Niaga memperoleh izin usaha sebagai bank umum, bank devisa, dan bank yang melakukan kegiatan perbankan lainnya berdasarkan prinsip syariah masing-masing berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan No. 249544/U.M.II tanggal 11 Nopember 1955, surat keputusan Direksi Bank Indonesia No. 7/116/Kep/Dir/UD tanggal 22 Nopember 1974 dan surat keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 6/71/KEP.GBI/2004 tanggal 16 September 2004. Kantor pusat Bank Niaga terletak di Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 Jakarta.

2. PT. Bank NISP Tbk. (NISP)

Bank NISP didirikan pada tahun 1941 berdasarkan akta No. 6 tanggal 4 April 1941 dari notaris Theodoor Johan Indewey Gerlings dengan nama NV. Nederlandsch Indische Spaar En Deposito Bank. Sesuai dengan perubahan Anggaran Dasar No. 65 tanggal 12 Desember 1957 yang dibuat dihadapan notaries Noezar, nama Bank diubah menjadi PT. Bank Tabungan NISP. Perubahan nama tersebut telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 83 tanggal 17 Oktober 1958. Sejak tahun 1967 Bank mengalami perubahan status dari Bank Tabungan menjadi Bank Umum sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. D.

15.6.2.27 tanggal 20 Juli 1967 dengan nama P.T. Bank NISP, berkedudukan dan berkantor pusat di Bandung. Kantor pusat Bank beralamat Jl. Gunung Sahari No. 38, Jakarta Pusat.

3. PT. Bank OUB Buana Tbk. (BBIA)

Bank Buana didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 150 tanggal 31 Agustus 1956 yang dibuat di hadapan notaries Eliza Pondaag, S.H. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam surat keputusan No. J.A 5/78/4 tanggal 24 Oktober 1956, didaftarkan pada PN Jakarta dengan No. 1811 tanggal 27 Oktober 1956 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 96, Tambahan No. 1234 tanggal 30 November 1956. Bank memperoleh izin usaha sebagai bank umum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 203443/U.M/II tanggal 15 Oktober 1956. Bank juga memperoleh izin untuk menjalankan aktivitas sebagai bank devisa berdasarkan Surat Keputusan Bank Indonesia No. 9/39/Kep/Dir/UD tanggal 22 Juli 1976. Bank memulai aktivitas perbankan secara komersial pada tanggal 1 November 1956. Kantor pusat bank beralamat di Jl. Gajah Mada No. 1A, Jakarta.

4. PT. Bank Nusantara Parahyangan Tbk. (BBNP)

Bank yang berdomisili di Bandung, dahulu bernama PT. Bank Pasar Karya Parahyangan didirikan berdasarkan akta notaries Komar Andasasmita, SH. No. 47 tanggal 18 Januari 1972 dan telah mendapatkan persetujuan dari Menterik Kehakiman RI melalui Surat Keputusan No. YA/11/19 tanggal 5 Mei 1974. Dalam akta notaries Albertus Sutjipto Budihardjoputro, SH. No.

27 tanggal 10 Maret 1989, para pemegang saham memutuskan untuk mengubah status bank dari Bank Pasar menjadi Bank Umum, dimana akta perubahan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman RI melalui Surat Keputusan No. C2-4155. Ht.01.04-Th 1989 tanggal 2 Mei 1989. Peningkatan status bank ini juga telah disetujui oleh menteri keuangan melalui SK No. 748/KMK,013/1989 tanggal 3 Juli 1989. Sesuai SK Direksi Bank Indonesia No. 27/54/KEP/DIR tanggal 5 Agustus 1994, Bank Indonesia telah menyetujui untuk meningkatkan status bank menjadi bank devisa.

5. PT. Bank Victoria International Tbk. (BVIC)

Bank didirikan di Jakarta dengan nama PT. Bank Victoria berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 71 tanggal 28 Oktober 1992, dibuat di hadapan Amrul Pohan, SH. LLM, notaries di Jakarta, dan kemudian berubah nama menjadi PT. Bank Victoria International berdasarkan Akta Pembetulan No. 30 tanggal 8 Juni 1993 dibuat di hadapan notaries yang sama dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman RI dengan SK No. C2-4903.HT.01.01.TH 93 tanggal 19 Juni 1993 dan didaftarkan di PN Jakarta Utara No. 342/Leg/1993 tanggal 29 Juni 1993 serta diumumkan dalam Berita Negara RI No. 39 tanggal 15 Mei 1998 Tambahan No. 2602. Bank mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 5 Oktober 1994, sesuai dengan ijin usaha yang diberikan oleh Menteri Keuangan RI dalam SK No. 402/KMK.017/1994 tanggal 10 Agustus 1994. Bank memperoleh ijin usaha sebagai pedagang valuta asing dari Bank Indonesia berdasarkan surat No.

029/126/UOPM tanggal 25 Mei 1997. Kantor pusat bank di Jl. Jend. Sudirman No. 1, Jakarta Selatan.

6. PT. Bank Mega Tbk. (MEGA)

Bank ini didirikan dengan nama PT. Bank Karman berdasarkan Akta Pendirian No. 32 tanggal 15 April 1969 yang kemudian diperbaiki dengan Akta Perubahan No. 47 tanggal 26 Nopember 1969. Bank mulai beroperasi secara komersial sejak tahun 1969 di Surabaya. Pada tahun 1992 nama Bank berubah menjadi PT. Mega Bank dan pada tanggal 17 Januari 2000 berubah menjadi PT. Bank Mega Tbk. Kantor pusat bank beralamat di Jl. Kapten Tendean 12-14A, Jakarta.

7. PT. Bank Negara Indonesia Tbk. (BBNI)

Bank ini mulanya didirikan di Indonesia sebagai bank sentral dengan nama "Bank Negara Indonesia" berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 1946 tanggal 5 Juli 1946. Selanjutnya berdasarkan UU No. 17 tahun 1968, BNI ditetapkan menjadi "Bank Negara Indonesia 1946", dan statusnya menjadi bank umum milik negara.

8. PT. Bank Century Tbk. (BCIC)

Dahulu nama bank ini adalah PT. Bank CIC Internasional Tbk. didirikan tahun 1989, berdasarkan akta No. 136 tanggal 30 Mei 1989 yang dibuat Lina Laksmiwardhani, S.H. Pada tanggal 16 April 1990, perusahaan memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum dari Menteri Keuangan RI melalui SK No. 462/KMK.013/1990. Pada tanggal 22 April 1993, perusahaan memperoleh

peningkatan status menjadi bank devisa dari Bank Indonesia melalui SK No. 26/5/KEP/DIR. Kantor pusat perusahaan beralamat di Gedung Sentral Senayan I Jl. Asia Afrika No.8 Jakarta.

9. PT. Bank Mayapada Internasional Tbk. (MAYA)

Bank ini didirikan atas dasar akta notaries No. 196 tanggal 7 September 1989 dari Edison Jingga, S.H. Akta Pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman RI dengan SK No. C2-25.HT.01.01.TH.90 tanggal 10 Januari 1990 serta diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI No. 37 tanggal 10 Mei 1994. Ijin usaha sebagai bank diberikan oleh Menteri Keuangan RI dalam SK No. 342/KMK.013/1990 tanggal 16 Maret 1990. Bank mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 16 Maret 1990. Bank memperoleh ijin bank devisa pada tanggal 3 Juni 1993 sesuai Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 26/26/KEP/DIR. Kantor pusat bank beralamat di Mayapada Tower Jl. Jend. Sudirman Kav. 28, Jakarta.

10. PT. Bank Swadesi Tbk. (BSWD)

Bank ini didirikan pada tahun 1968 berdasarkan akta No. 20 tanggal 28 September 1968 dari Njoo Sioe Liep, SH. Notaris dari Surabaya, dengan nama PT. Bank Pasar Swadesi. Bank mendapat ijin usaha sebagai bank umum dari Menteri Keuangan dengan SK No. 906/KMK.013/1989 tanggal 16 Agustus 1989. Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/68/KEP/DIR tanggal 12 Oktober 1994, bank memperoleh ijin untuk melakukan kegiatannya sebagai bank devisa. Kantor pusat bank beralamat di Jl. H. Samanhudi No. 37, Jakarta Pusat.

11. PT. Bank Artha Graha Internasional Tbk. (INPC)

Bank ini didirikan dengan nama PT. Inter-Pacific Financial Corporation berdasarkan Akta No. 12 tanggal 7 September 1973 dibuat dihadapan Bagijo, SH., dengan ruang lingkup sebagai lembagai keuangan bukan bank. Berdasarkan Akta Nomor 67 tanggal 19 Mei 1992, dibuat dihadapan Adam Kasdarmadji, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 10 tanggal 2 Februari 1993 Tambahan Nomor 591, PT Inter-Pacific Financial Corporation berubah nama menjadi PT Inter-Pacific Bank. Pada tanggal 24 Februari 1993, PT Inter-Pacific Bank mendapatkan izin usaha sebagai bank umum melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 176/KMK.017/1993. Berdasarkan Akta Nomor 44 tanggal 13 Juni 1997 juncto Akta Nomor 8 tanggal 15 Januari 1998, keduanya dibuat dihadapan Sri Nanning, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 70 tanggal 1 September 1998 Tambahan Nomor 5056, nama PT Inter-Pacific Bank berubah menjadi PT. Bank Inter-Pacific, Tbk. Berdasarkan Akta Nomor 27 tanggal 12 Juli 2005, dibuat dihadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan izin dari Bank Indonesia dengan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 7/49/KEP.GBI/2005 tanggal 16 Agustus 2005, PT Bank Inter-Pacific, Tbk. berganti nama menjadi PT Bank Artha Graha Internasional, Tbk. Perubahan nama tersebut telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 101 tanggal 19 Desember 2006 Tambahan Nomor 13128.

12. PT. Bank Agroniaga Tbk. (AGRO)

PT Bank Agroniaga, Tbk ("Bank") didirikan dengan akta No. 27 Notaris Raden Soekarsono, S.H tanggal 27 September 1989. Anggaran dasar Bank telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C.2-10019.HT.01.01-TH.89 tanggal 28 Oktober 1989 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 96 Tambahan No. 3303 tanggal 1 Desember 1989. Bank memperoleh izin usaha sebagai bank umum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 1347/KMK.013/1989 tanggal 11 Desember 1989 dan Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No. 22/1037/UPPS/PSbD tanggal 26 Desember 1989. Pada tanggal 8 Mei 2006, Bank mendapatkan izin sebagai bank devisa berdasarkan keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 8/41/KEP.GBI/2006.

13. PT. Bank Capital Indonesia Tbk. (BACA)

PT Bank Capital Indonesia Tbk (“Bank”) didirikan berdasarkan akta Pendirian No. 139 tanggal 20 April 1989 yang kemudian diubah dengan akta Perubahan No. 58 tanggal 3 Mei 1989, keduanya dibuat di hadapan Nyonya Siti Pertiwi Henny Shidki, S.H., Notaris di Jakarta dengan nama PT Bank Credit Lyonnais Indonesia. Nama Bank telah diubah menjadi PT Bank Capital Indonesia berdasarkan akta Notaris Sri Hasmiarti, S.H., No. 1 tanggal 1 September 2004. Perubahan nama tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-24209 HT.01.04.TH.2004 tanggal 29 September 2004 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 101 tanggal

17 Desember 2004, Tambahan No. 12246. Kantor pusat Bank beralamat di Sona Topas Tower Lantai 12, Jl. Jendral Sudirman Kav. 26, Jakarta Selatan.

14. PT. Bank Bukopin Tbk. (BBKP)

PT Bank Bukopin Tbk. (“Bank”) didirikan di Republik lndonesia pada tanggal 10 Juli 1970 dengan nama Bank Umum Koperasi Indonesia (disingkat Bukopin) yang disahkan sebagai badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Koperasi No. 13/Dirjen/Kop/70 dan didaftarkan dalam Daftar Umum Direktorat Jenderal Koperasi No. 8251 pada tanggal yang sama. Bank mulai melakukan usaha komersial sebagai bank umum koperasi di Indonesia sejak tanggal 16 Maret 1971 dengan izin Menteri Keuangan dalam Surat Keputusan No. Kep-078/DDK/II/3/1971 tanggal 16 Maret 1971. Kantor pusat Bank beralamat di Jalan M.T. Haryono Kav. 50-51, Jakarta 12770, Indonesia.

15. PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. (BDMN)

Bank ini didirikan di Jakarta pada tanggal 16 Juli 1956, berdasarkan akta notaries Meester Raden Soedja, S.H. No. 134. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman RI dengan SK No. J.A.5/40/8 tanggal 24 April 1957 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 664, pada Berita Negara RI No. 46 tanggal 7 Juni 1957. Bank memperoleh izin usaha sebagai bank umum, bank devisa dan bank yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah masing-masing berdasarkan prinsip syariah masing-masing berdasarkan SK No. 161259/U.M.II tanggal 30 September 1958. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 21/10/Dir/UPPS tanggal 5 November 1988 dan Surat

Direktorat Perijinan dan Informasi Perbankan No. 3/744/DPIP/Prz tanggal 31 Desember 2001. Kantor pusat bank beralamat di gedung Menara Bank Danamon Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. E4 No. 6 Mega Kuningan, Jakarta.

16. PT. Bank Kesawan Tbk. (BKSW)

PT Bank Kesawan Tbk ("Bank") didirikan pada tanggal 1 April 1913 dengan nama N.V Chungwha Shangyeh Maatschappij (*The Chinese Trading Company Limited*) berdasarkan Akta No. 53 yang dibuat dihadapan Notaris Leonard Hendrik-Willem Van Sandick tanggal 28 April 1913 dan diumumkan dalam Extra Bijvougsel der Javasche Courant No. 78 tanggal 30 September 1913. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 191547/U.M.II tanggal 28 Oktober 1958, Bank memulai kegiatan operasionalnya sebagai Bank Umum. Nama Bank diubah menjadi PT Bank Kesawan berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 60 yang dibuat dihadapan Notaris Ong Kiem Lian tanggal 10 Maret 1965 dan memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. J.A.5/68/15 tanggal 3 Juli 1965 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 95 tanggal 26 Nopember 1965, Tambahan No. 395. Bank memperoleh persetujuan menjadi Pedagang Valuta Asing berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/366/UD/DIR tanggal 4 Desember 1995. Bank memperoleh persetujuan menjadi Bank Devisa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/150/KEP/DIR tanggal 22 Pebruari 1996. Kantor pusat bank terletak di Jl. Hayam Wuruk No. 33, Jakarta Pusat.

17. Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk. (SDRA)

PT Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk (untuk selanjutnya disebut Bank) didirikan berdasarkan akta pendirian No. 30 tanggal 15 Juni 1974 yang dibuat di hadapan Noezar, SH, Notaris di Bandung. Akta pendirian ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. YA 5/224/3 tanggal 30 Juni 1975 dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Bandung No. 132/1975 tanggal 17 Juli 1975 serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 448 pada Berita Negara Republik Indonesia No. 69 tanggal 29 Agustus 1975. Kegiatan utama Bank adalah menjalankan usaha sebagai Bank Umum. Bank memperoleh ijin usaha sebagai Bank Umum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.Kep-067/ KM.17/1993 tanggal 7 April 1993. Kantor Pusat Bank berkedudukan di Jalan Buah Batu No. 58, Bandung 40262.

4.1.5 Aktivitas Perusahaan

Sebagaimana kegiatan bank pada umumnya, perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia melakukan kegiatan operasi atau aktivitas perusahaan dengan 3 (tiga) jenis yaitu penghimpunan dana, penyaluran dana, dan melayani jasa perbankan. Ketiga jenis aktivitas tersebut kemudian diaplikasikan ke dalam bentuk produk-produk yang merupakan bagian dari strategi perbankan. Produk-produk yang ditawarkan memberikan banyak keuntungan dan kemudahan bagi nasabahnya baik dalam produk penghimpunan dana, penyaluran dana atau disebut juga dengan pembiayaan maupun dalam memberikan jasa perbankan yang memberikan kemudahan transaksi bisnis dan sistem pembayaran. Produk-produk

yang ditawarkan dari waktu ke waktu semakin bertambah dan beragam seiring dengan perkembangan perbankan di Indonesia.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Hasil Uji Kualitatif

4.2.1.1 *Right Issue* pada Sektor Perbankan Periode Tahun 2005-2009

Pada penelitian ini, penulis meneliti *Right Issue* pada perusahaan yang bergerak di sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun dari 2005-2009. Data pada penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit berupa laporan perubahan modal dan data harga saham yang telah dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia.

Right Issue merupakan salah satu aksi korporasi yang dilakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan modal dari masyarakat dengan memberikan hak untuk memesan terlebih dahulu. Dengan melakukan *right issue*, perusahaan berharap mendapatkan tambahan modal untuk kegiatan operasi perusahaan maupun investasi. *Right Issue* ini akan merubah modal awal yang disetor yang dihitung dengan menggunakan rumus:

$$= \frac{-}{\qquad} \quad 100\%$$

Sumber: Mohammad Samsul, 2006

Dimana :

M_0 = Perubahan modal saham perusahaan
$M_{t=1}$ = Modal saham perusahaan pada saat ini
$M_{t=-1}$ = Modal saham perusahaan pada tahun sebelumnya

Dengan data perusahaan yang diperoleh penulis melalui Bursa Efek Indonesia, maka dapat disajikan data *Right Issue* para perbankan selama 5 tahun mulai dari tahun 2005-2009, sebagai berikut:

Tabel 4.1

Right Issue pada Perbankan Periode Tahun 2005-2009
(Dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	Emiten	Modal Saham Sebelum *Right*		Modal Saham Setelah *Right Issue*		Perubahan Modal Saham
2005	BNGA	Rp	748.549	Rp	949.749	26,88
	NISP	Rp	516.747	Rp	616.996	19,40
2006	BBIA	Rp	1.441.561	Rp	1.663.339	15,38
	BBNP	Rp	79.138	Rp	158.275	100,00
	BVIC	Rp	129.459	Rp	196.495	51,78
	MEGA	Rp	712.694	Rp	812.722	14,04
2007	NISP	Rp	616.996	Rp	726.822	17,80
	BBNI	Rp	7.042.194	Rp	7.789.288	10,61
	BCIC	Rp	1.769.049	Rp	2.211.312	25,00
	INPC	Rp	558.840	Rp	651.980	16,67
	MAYA	Rp	284.129	Rp	412.955	45,34
2008	BSWD	Rp	62.000	Rp	173.600	180,00
	BVIC	Rp	233.499	Rp	350.249	50,00
	INPC	Rp	651.980	Rp	950.804	45,83
2009	AGRO	Rp	234.906	Rp	341.820	45,51
	BACA	Rp	151.088	Rp	453.264	200,00
	SDRA	Rp	150.000	Rp	163.795	9,20
	BBKP	Rp	782.633	Rp	811.238	3,65
	BDMN	Rp	3.631.865	Rp	5.289.312	45,64
	BKSW	Rp	125.304	Rp	156.630	25,00

Sumber : Laporan Perubahan Modal Perusahaan

Dari tabel 4.1 di atas dapat dilihat bahwa setelah perbankan melakukan aksi korporasi berupa *right issue*, maka terjadi perubahan modal pada perbankan. Rata-rata perubahan modal yang terjadi pada perbankan yang melakukan *right issue* sebesar 47,39%. Hal ini menunjukkan bahwa dengan dilakukannya *right issue* maka perusahaan mengalami perubahan modal.

Perubahan modal yang mengalami kenaikan yang tinggi adalah Bank Capital Indonesia Tbk. yang mencapai 200%. Sedangkan kenaikan modal yang kecil dialami oleh Bank Bukopin yakni sebesar 3,65%. Penambahan modal pada perbankan dilakukan guna menambah dana untuk membantu kegiatan operasional perusahaan. Baik dalam bidang investasi atau pemberian pinjaman.

Tahun 2005 terdapat 2 bank yang melakukan *right issue*, yaitu Bank Niaga dengan perubahan modal saham sebesar 26,88%. Dan Bank NISP mengalami kenaikan modal saham sebesar 19,40%. Berdasarkan pengamatan yang telah peneliti lakukan, penambahan modal perusahaan yang dilakukan oleh kedua perbankan ini karena kedua bank tersebut menambah investasinya berupa mendirikan kantor cabang.

Tahun 2006 terdapat 4 bank yang melakukan *right issue*, yaitu Bank Buana mengalami perubahan modal saham sebesar 15,38%, Bank Bumi Nusantara Parahyangan sebesar 100%, Bank Victoria sebesar 51,78%, dan Bank Mega sebesar 14,04%. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peniliti, beberapa bank yang melakukan *right issue* pada tahun 2006, yaitu untuk menanamkan investasi baik menanamkan modalnya pada perusahaan lain atau mendirikan kantor cabang.

Tahun 2007 terdapat 5 bank yang melakukan *right issue*, yaitu Bank NISP mengalami perubahan modal saham sebesar 17,80%, Bank BNI sebesar 10,61%, Bank Century sebesar 25%, Bank Artha Graha 16,67%, dan Bank Mayapada sebesar 45,34%. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, beberapa

bank yang melakukan *right issue* pada tahun 2007, yaitu untuk mencari dana tambahan untuk membayar hutang. Hal ini karena pada tahun 2007 terjadi krisis ekonomi.

Tahun 2008 terdapat 3 bank yang melakukan *right issue*, yaitu Bank Swadesi sebesar 180%, Bank Victoria sebesar 50%, dan Bank Arta Graha Internasional sebesar 45,83%. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, beberapa bank yang melakukan *right issue* untuk membayar hutang bank. Karena pada tahun ini terjadi krisis ekonomi global.

Tahun 2009 terdapat 6 bank yang melakukan *right issue*, yaitu Bank Agroniaga sebesar 45,51%, Bank Capital Indonesia sebesar 200%, Bank Himpunan Saudara sebesar 9,2%, Bank Bukopin sebesar 3,65%, Bank Danamon sebesar 45,64%, dan Bank Kesawan sebesar 25%. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, beberapa bank yang melakukan *right issue* pada tahun 2009, yaitu untuk mencari dana tambahan untuk membayar hutang. Hal ini dapat dilihat karena bertambahnya kewajiban perusahaan sehingga banyak bank yang melakukan *right issue*.

Ada 2 bank yang melakukan *right issue* sebanyak 2 kali selama periode 2005-2009 yakni Bank NISP pada tahun 2005 dan 2007, dan Bank Victoria pada tahun 2006 dan 2008. Kedua bank ini melakukan *right issue* karena untuk mendapatkan dana guna menambah jumlah investasinya.

4.2.1.2 *Cost of Equity Capital* pada Sektor Perbankan Tahun 2005-2009

Pada penelitian ini, penulis meneliti *cost of equity capital* pada perusahaan yang bergerak di sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun dari 2005-2009. Data pada penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit berupa laporan rugi laba dan data harga saham yang telah dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia.

Cost of Equity Capital merupakan tingkat pengembalian yang diharapkan oleh nvestor terhadap suatu investasi dengan tingkat risiko yang sama. Untuk mengetahui besarnya jumlah *cost of equity capital* maka peneliti menggunakan rumus:

$$= \frac{\quad}{\quad} \quad 100\%$$

Sumber : Erich A. Helfert, 2001

Keterangan :
k_e = *Cost of Equity Capital*
EPS = *Earning Per Share* / laba per saham
P = *Price /* harga pasar saham

Berikut adalah rincian perhitungan dari *cost of equity capital* pada sektor perbankan yang melakukan *right issue* selama periode tahun 2005-2009, sebagai berikut:

Tabel 4.2

Cost of Equity Capital Perbankan yang *Right Issue* tahun 2005-2009

Tahun	Emiten	EPS	Harga	COEC
2005	BNGA	Rp 60,07	Rp 387,63	0,15497
	NISP	Rp 48,79	Rp 770,00	0,06336
2006	BBIA	Rp 65,00	Rp 970,00	0,06701
	BBNP	Rp 154,00	Rp 700,00	0,22000
	BVIC	Rp 14,94	Rp 90,00	0,16600
	MEGA	Rp 97,00	Rp 2.045,08	0,04743
2007	NISP	Rp 45,29	Rp 152,00	0,29796
	BBNI	Rp 64,00	Rp 1.924,03	0,03326
	BCIC	Rp 2,01	Rp 68,00	0,02956
	INPC	Rp 2,56	Rp 100,00	0,0256
	MAYA	Rp 15,81	Rp 953,53	0,01658
2008	BSWD	Rp 32,01	Rp 579,66	0,05522
	BVIC	Rp 12,91	Rp 93,00	0,13882
	INPC	Rp 2,55	Rp 50,00	0,051
2009	AGRO	Rp 0,69	Rp 141,00	0,00489
	BACA	Rp 7,73	Rp 93,00	0,08312
	SDRA	Rp 23,73	Rp 325,00	0,07302
	BBKP	Rp 63,09	Rp 385,00	0,16387
	BDMN	Rp 186,36	Rp 4.400,00	0,04235
	BKSW	Rp 6,37	Rp 750,00	0,00849

Sumber : Annual Report

Berdasarkan data dari tabel 4.2, bahwa setelah perbankan melakukan *right issue* maka terjadi perubahan pada *cost of equity capital.* Rata-rata perubahan *cost of equity capital* pada perbankan yang melakukan *right issue* adalah sebesar 0,0078.

Perbankan yang mengalami kenaikan pada *cost of equity capital* adalah Bank NISP yakni sebesar 4,2746. Hal ini karena pada tahun 2007, Bank NISP mengalami peningkatan EPS dan harga saham. Sedangkan perbankan yang mengalami penurunan pada *cost of equity capital* adalah Bank Agroniaga yakni

sebesar -1,7046. Hal ini karena pada tahun 2009, Bank Agroniaga mengalami penurunan EPS dan harga saham, serta terjadinya krisis ekonomi.

Tahun 2005, *cost of equity capital* Bank NISP setelah melakukan *right issue* sebesar 0,15497, dan *cost of equity capital* Bank Niaga sebesar 0,06336. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, kedua bank tersebut mengalami penurunan EPS dan harga saham pada saat *right issue.*

Tahun 2006, *cost of equity capital* Bank Buana setelah melakukan *right issue* sebesar 0,06701, *cost of equity capital* Bank Nusantara Parahyangan sebesar 0,22000, *cost of equity capital* Bank Victoria sebesar 0,16600, dan *cost of equity capital* Bank Mega sebesar 0,04743.

Tahun 2007, *cost of equity capital* Bank NISP sebesar 0,29796, *cost of equity capital* Bank BNI sebesar 0,03326, *cost of equity capital* Bank Victoria sebesar 0,02956, *cost of equity capital* Bank Arta Graha Internasional sebesar 0,02560, dan *cost of equity capital* Bank Mayapada sebesar 0,01658.

Tahun 2008, *cost of equity capital* Bank Swadesi sebesar 0,05522, *cost of equity capital* Bank Century sebesar 0,13882, dan *cost of equity capital* Bank Arta Graha Internasional 0,05100.

Tahun 2009, *cost of equity capital* Bank Agroniaga sebesar 0,00489, *cost of equity capital* Bank Capital Indonesia sebesar 0,08312, *cost of equity capital* Bank Himpunan Saudara sebesar 0,07302, *cost of equity capital* Bank Bukopin sebesar 0,16387, *cost of equity capital* Bank Danamon sebesar 0,04235, dan *cost of equity capital* Bank Kesawan sebesar 0,00849.

Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan dapat dilihat bahwa pada tahun 2009 terjadi kenaikan *cost of equity capital* pada perbankan. Hal ini disebabkan karena telah pulihnya kepercayaan investor serta nasabah kepada sektor perbankan. Sedangkan penurunan *cost of equity capital* terendah terjadi pada tahun 2008, karena pada tahun ini terjadi krisis global dan kasus bank century, sehingga menyebabkan penurunan tingkat kepercayaan investor dan nasabah terhadap sektor perbankan.

4.2.2 Hasil Uji Kuantitatif

4.2.2.1 Analisis *Right Issue* dan *Cost Of Equity Capital* pada Sektor Perbankan Periode Tahun 2005-2009

Berdasarkan hasil analisis mengenai *right issue* dan hasil analisis mengenai *cost of equity capital* pada sektor perbankan. Maka penulis mencoba menganalisis pengaruh *right issue* terhadap *cost of equity capital*. Berikut perbandingan data yang telah dianalisis sebelumnya:

Tabel 4.3

Right Issue dan *Cost of Equity Capital*

Pada Perbankan Tahun 2005-2009

Tahun	Emiten	Perubahan Modal Saham Perusahaan	*Cost of Equity Capital*
2005	BNGA	26,88%	0,15497
	NISP	19,40%	0,06336
2006	BBIA	15,38%	0,06701
	BBNP	100,00%	0,22000
	BVIC	51,78%	0,16600
	MEGA	14,04%	0,04743
2007	NISP	17,80%	0,29796
	BBNI	10,61%	0,03326
	BCIC	25,00%	0,02956
	INPC	16,67%	0,02560
	MAYA	45,34%	0,01658
2008	BSWD	180,00%	0,05522
	BVIC	50,00%	0,13882
	INPC	45,83%	0,05100
2009	AGRO	45,51%	0,00489
	BACA	200,00%	0,08312
	SDRA	9,20%	0,07302
	BBKP	3,65%	0,16387
	BDMN	45,64%	0,04235
	BKSW	25,00%	0,00849

Sumber : Bursa Efek Indonesia

Dari hasil data penelitian yang ada di tabel 4.3, terlihat bahwa kenaikan modal terbesar pada saat *right issue* terjadi pada Bank Capital Indonesia Tbk. pada tahun 2009, yakni sebesar 200%. Sedangkan kenaikan modal terendah pada saat *right issue* terjadi pada Bank Bukopin Tbk. pada tahun 2009, yakni sebesar 3,65%. Peningkatan *cost of equity capital* yang tertinggi dialami oleh Bank NISP Tbk. pada tahun 2007, yakni sebesar 0,29796. Dan penurunan *cost of equity capital* terendah dialami oleh Bank Agroniaga Tbk. pada tahun 2009, yakni sebesar 0,00489.

A. Korelasi Pearson

Sebelum dianalisis pengaruh *right issue* terhadap cost of equity capital pada Perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia periode 2005-2009, terlebih dahulu dicari hubungan antara *right issue* dengan cost of equity capital menggunakan analisis korelasi. Analisis korelasi digunakan untuk melihat seberapa erat atau seberapa kuat hubungan antar variabel yang sedang diteliti. Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan *software SPSS 15 for windows*, diperoleh hasil estimasi besarnya hubungan antara variabel X dengan variabel Y pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.4

Korelasi Antara Variabel X dengan Variabel Y

Correlations

		Right Issue	COEC
Right Issue	Pearson Correlation	1	,027
	Sig. (1-tailed)		,455
	N	20	20
COEC	Pearson Correlation	,027	1
	Sig. (1-tailed)	,455	
	N	20	20

Berdasarkan hasil pengolahan data di atas dapat dilihat bahwa besarnya hubungan antara *right issue* dengan *cost of equity capital* yang dihitung dengan koefisien korelasi adalah 0,027. Hal ini menunjukkan hubungan antara *right issue* dengan *cost of equity capital* pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia periode 2005-2009 sangat lemah. Arah hubungan yang positif ditunjukkan dengan tidak adanya tanda negatif pada angka 0,027, menunjukkan bahwa *right issue*

pada umumnya membuat *cost of equity capital* semakin tinggi. Kemudian tingkat signifikansi koefisien korelasi satu sisi (diukur dari nilai signifikansi) menghasilkan angka 0.455 atau lebih besar dari 0,05. Oleh karena nilai signifikansi jauh lebih besar dari 0.05, maka disimpulkan korelasi antara *right issue* dengan *cost of equity capital* pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia periode 2005-2009 tidak signifikan.

B. Analisis Regresi Linier

Selanjutnya untuk menguji pengaruh *right issue* (X) terhadap *cost of equity capital*(Y) pada Perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia periode 2005-2009 digunakan analisis regresi linier sederhana. Dengan menggunakan bantuan *software SPSS 15 for windows*, diperoleh hasil regressi seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.5

Hasil Analisis Regresi

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.085	.024		3.511	.002
	Right Issue	.004	.034	.027	.115	.910

a. Dependent Variable: COEC

Melalui koefisien regressi (B) yang terdapat pada tabel di atas maka dapat dibentuk sebuah persamaan regresi sebagai berikut:

Y = 0.085 + 0.004 X

Dimana : Y = *Cost of equity capital* X= *Right Issue*

Berdasarkan pesamaan regressi tersebut dapat dilihat bahwa koefisien regresi memiliki tanda positif yang berarti penambahan jumlah modal saham pada saat *right issue* meningkatkan *cost of equity capital* pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia periode 2005-2009. Nilai koefisien variabel X (*right issue*) sebesar 0.004 menunjukkan bahwa peningkatan modal saham sebesar 1% pada saat *right issue* menyebabkan peningkatan *cost of equity capital* sebesar 0.004%. Sementara nilai konstanta sebesar 0.085 merupakan nilai estimasi rata-rata *cost of equity capital* jika tidak ada *right issue*.

Kemudian nilai standar error pada tabel 4.5 diatas menunjukkan penyimpangan dari koefisien regressi (B), misalnya nilai standar error koefisien konstanta sebesar 0.024 menunjukkan bahwa nilai konstanta tersebut bervariasi antara [0.085 – 0.024] sampai [0.085 + 0.024]. Demikian juga dengan nilai standar error koefisin *right issue* sebesar 0.034 menunjukkan bahwa nilai koefisien *right issue* tersebut bervariasi antara [0.004 – 0.034] hingga [0.004 + 0.034]. Selanjutnya nilai koefisien yang distandarisasi (Beta) merupakan nilai koefisien pengaruh dan angkanya sama dengan koefisien korelasi. Nilai t pada tabel diatas merupakan hasil pembagian koefisien regressi (B) terhadap standar error, nilai ini digunakan untuk menguji signifikansi koefisien regressi.

C. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R-square) merupakan koefisien yang digunakan untuk mengetahui besarnya kontribusi variabel independen terhadap perubahan variabel dependen. Hasil perhitungan koefisien determinasi dengan menggunakan *software SPSS 15 for windows* sebagai berikut:

Tabel 4.6

Koefisien Determinasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.027[a]	.001	-.055	.08042

a. Predictors: (Constant), Right Issue

b. Dependent Variable: COEC

Melalui hasil pengolahan seperti dijabarkan pada tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai R-square adalah sebesar 0.001, nilai ini dikenal dengan koefisien determinasi (KD).

KD = (0.001) x 100% = 0,1%

Koefisien determinasi sebesar 0.1% menunjukkan bahwa hanya 0.1% perubahan pada *cost of equity capital* pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia periode 2005-2009 bisa dijelaskan atau dipengaruhi oleh *right issue*. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 99.9% dipengaruhi variabel lain di luar *right issue*, seperti tingkat likuiditas saham, tingkat disclosure, ukuran perusahaan/emiten, situasi ekonomi dan politik.

D. Uji Hipotesis

Masih menggunakan data perhitungan pada tabel 4.5 di atas, akan dilakukan pengujian pengaruh *right issue* terhadap *cost of equity capital* pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia periode 2005-2009 denganrumusan hipotesis sebagai berikut.

$H_0 : \beta = 0$ Right issue berdampak tidak signifikan terhadap *cost of equity capital* pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia periode 2005-2009

$Ha : \beta \neq 0$ Right issue berdampak signifikan terhadap *cost of equity capital* pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia periode 2005-2009

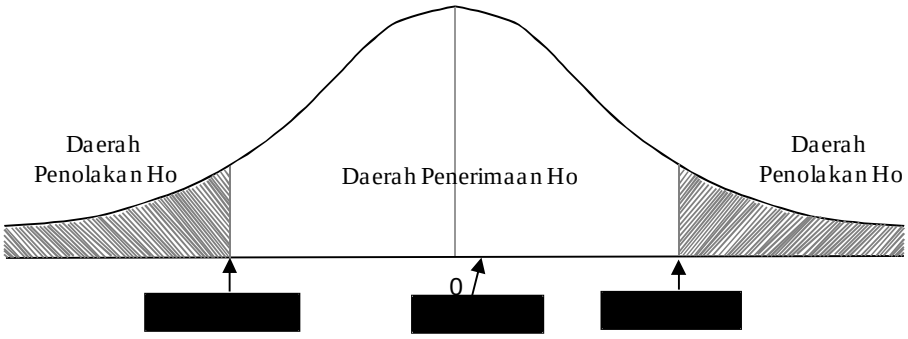
.

Hasil perhitungan pada tabel 4.5 di atas menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} adalah sebesar 0.115. Sedangkan t_{tabel} pada tingkat signifikansi 5% (α = 0,05) dan derajat kebebasan (dk) = 18 pada pengujian dua arah adalah 2,101. Karena t_{hitung} (0.115) lebih kecil dari t_{tabel} (2.101), maka pada tingkat kekeliruan 5% H_0 ditolak dan Ha diterima sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat pengaruh dari variabel *right issue* terhadap *cost of equity capital* pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia periode 2005-2009. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan penarikan hipotesis sebagai berikut:

Jika t_{hitung} > dari t_{tabel}, maka Ho ditolak, H_1 diterima

Jika t_{hitung} < dari t_{tabel}, maka Ho diterima, H_1 ditolak

Kesimpulan yang sama juga diperoleh melalui nilai signifikansi, dimana nilai signifikansi koefisien *right issue* sebesar 0.910 dan jauh lebih besar dibanding tingkat kekeliruan 5% (α=0,05) sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat pengaruh *right issue* terhadap *cost of equity capital* pada Perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia periode 2005-2009.



Gambar 4.1

Grafik Daerah Penolakan dan Penerimaan Hipotesis

4.2.3 Penarikan Kesimpulan

Hasil analisis diperoleh bahwa ada hubungan antara *right issue* dengan *cost of equity capital* sebesar r= 0,027 yang artinya hubungan kedua variabel ini sangat lemah. Pengaruh *right issue* terhadap *cost of equity capital* dapat diprediksi dengan menggunakan persamaan Y = 0.085 + 0.004 X, yang artinya bahwa peningkatan modal saham sebesar 1% pada saat *right issue* menyebabkan peningkatan *cost of equity capital* sebesar 0.004%. Sementara nilai konstanta sebesar 0.085 merupakan nilai estimasi rata-rata *cost of equity capital* jika tidak ada *right issue*. Besarnya kontribusi *right issue* terhadap *cost of equity capital* sebesar 0,1%. Angka tersebut berarti bahwa sebesar 0,1% *cost of equity capital* pada perbankan dipengaruhi oleh *right issue,* sedangkan sisanya 99,9% dipengaruhi faktor lainnya seperti, harga saham, likuiditas saham, tingkat *disclosure,* ukuran perusahaan, dan keadaan politik serta ekonomi dalam negeri. Hal ini bertolak belakang dengan pendapat Martono dan D. Agus Harjito (2008) yang menyatakan bahwa biaya ekuitas akan mengalami kenaikan dengan cara

menahan laba atau mengeluarkan saham biasa baru. Karena investor menilai pada saat ini, emiten atau perusahaan yang mengeluarkan saham biasa baru adalah untuk menutupi hutang operasional maupun investasinya. Sehingga emiten yang mengeluarkan saham biasa baru kurang diminati oleh para investor.